



► DANA PESTA DEMOKRASI

Pemilu, Pemkot Siapkan Rp36 Miliar

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menganggarkan sebanyak Rp36 miliar kepada instansi penyelenggara Pemilu di wilayahnya untuk persiapan hajatan demokrasi lima tahunan pada 2024 mendatang.

Dana itu dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di wilayah setempat. "Dukungan anggaran sudah kami realisasikan dan komitmen kemarin juga sudah dibahas untuk 2023 sudah mulai dan 2024 apalagi sudah ada. Saya lupa berapa tetapi KPU sudah dan Bawaslu juga ada total Rp36 miliar kurang lebih," kata Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi usai pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rabu (4/1).

Sumadi menyebut, alokasi anggaran itu diharapkan mampu menyukseskan gelaran Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Kota Jogja pada 2024 mendatang. Pihaknya telah menyusun regulasi pelengkap untuk memberikan payung hukum terhadap ketentuan pelaksanaan Pemilu di wilayahnya.

"Dukungan Perwal [Peraturan Wali Kota] saya rasa sudah ada keputusan KPU yang sudah dikeluarkan. Dan kalau Perwal untuk anggaran dan sarana prasarana sudah disiapkan," ujarnya.

Dalam pelantikan petugas PPK itu, dia menekankan soal integritas dan dedikasi terhadap fungsi aparat penyelenggara Pemilu yang netral dan tidak mempunyai kepentingan apapun selain menyelenggarakan proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Mereka ini kan orang yang sudah melalui seleksi yang ketat dan dipercaya maka kami sangat berharap mereka bisa melaksanakan tugasannya dengan baik, penuh dedikasi tanggung jawab dan integritas yang harus dijaga," katanya.

Ketua KPU Kota Jogja, Hidayat Widodo mengatakan total ada sebanyak 70 petugas PPK yang dilantik dan terdiri dari lima orang dari 14 kementren yang ada di Kota Jogja. Mereka sebelumnya telah melewati proses seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara untuk kemudian ditetapkan sebagai petugas PPK di kementren. Sebanyak 30 persen dari total PPK merupakan wajah lama yang sebelumnya pernah menjabat.

"Setelah dilantik, mereka langsung bekerja, terutama hari ini kami langsung gelar bimtek [bimbingan teknis] dan langsung pembentukan divisi masing-masing di kementren dan pembentukan ketua serta korwil untuk koordinasi wilayah," katanya.

Dia juga menekankan soal independensi yang harus dijaga dari seorang petugas PPK saat bekerja tanpa tendensi atas kepentingan apa pun. *(Yosel Leon)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005